

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indo-Pasifik merepresentasikan suatu kawasan yang multidimensi, kompleks, dan interaksi antar negara yang terjalin sangat dipengaruhi oleh upaya untuk mencapai kepentingan nasional. Dinamika relasi yang dibangun menjadi suatu faktor utama yang mendorong integrasi pembangunan konektivitas. Sehingga suatu lingkungan yang kondusif perlu untuk diciptakan agar dapat memfasilitasi suatu hubungan kerja sama yang progresif dalam upaya untuk mendukung keberlangsungan pertumbuhan kawasan. Pembangunan kawasan Indo-Pasifik meliputi interaksi berbagai faktor yang salah satunya berasal dari keberhasilan negara untuk mengembangkan kapasitas kekuatannya. Pemberdayaan kapasitas dan daya saing negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya bertujuan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi agar dapat bertahan di dalam sistem internasional yang anarki.

Memegang status sebagai negara adidaya dalam sistem internasional, Amerika Serikat berupaya mencapai kepentingan strategisnya dengan membangun pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan yang lebih demokratis. Perumusan kepentingan ini didorong oleh adanya potensi yang sangat besar di kawasan. Sehingga tiap negara pun mengembangkan suatu visi dan proyeksi yang dimanifestasikan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional. Selain itu, orientasi internasional masing-masing negara juga dirumuskan melalui strategi tertentu untuk menciptakan integrasi kawasan yang inklusif dan progresif.

Dalam upaya untuk mempertahankan pengaruhnya, Amerika Serikat menempatkan kawasan ini sebagai prioritas dalam melakukan interaksi global oleh karena dinamika kawasan yang sangat mempengaruhi stabilitas global. Selain karena memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar, kawasan Indo-Pasifik juga dihuni oleh berbagai kekuatan berkembang lainnya yang sangat berkontribusi dalam interaksi ekonomi global. Pentingnya kawasan ini bagi Amerika Serikat semakin terlihat semenjak kebijakan *Pivot to Asia* diperkenalkan pada masa pemerintahan Obama. Kebijakan ini dilihat sebagai orientasi pendekatan Amerika Serikat untuk membangun hubungan yang lebih komprehensif dengan negara-negara di Asia dan menunjukkan semakin pentingnya peran kawasan ini dalam formulasi orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Di bawah administrasi Donald Trump, pendekatan yang dilakukan terkesan lebih nasionalis, pragmatis, dan cenderung meninggalkan kerja sama multilateral yang telah dibangun sebelumnya. Dalam proses pengambilan keputusan ada sangat banyak hambatan dan pertimbangan mengenai beban finansial serta keamanan yang dapat membahayakan kepentingan nasional Amerika Serikat. Suatu kerangka pembangunan regional pun ditekankan melalui *Free and Open Indo-Pacific* yang juga merupakan suatu tanggapan terhadap kebijakan asertif militer dan berkembangnya kapasitas ekonomi Tiongkok. Pendekatan ini lebih fokus sebagai suatu formulasi kebijakan untuk mengimbangi dan sekaligus membatasi berkembangnya dominasi kekuatan Tiongkok di kawasan (Heiduk, 2022).

Presiden Biden, walaupun berbeda haluan partai politik dengan Trump, memiliki pandangan kebijakan luar negeri yang tidak terlalu jauh berbeda mengenai

kekuatan Tiongkok. Biden bahkan memiliki orientasi pendekatan luar negeri yang lebih aktif lagi yang kembali ditekankan untuk membentuk suatu hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Upaya ini tentunya bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional, tetapi juga menjadi suatu legitimasi bahwa Amerika Serikat dapat menjadi aktor utama yang dapat menjamin hal tersebut. Presiden Biden kembali mengembangkan kerangka *Free and Open Indo-Pacific* dengan menekankan adanya kerja sama internasional yang komprehensif dengan mitra strategis di kawasan dalam membangun suatu aksi yang terintegrasi dalam berbagai aspek dan tentunya untuk mengatasi masalah-masalah dan ancaman yang ada dalam kawasan (Heiduk, 2022).

Indo-Pasifik hadir sebagai kerangka geopolitik yang berkembang dan digunakan oleh beberapa negara untuk memproyeksikan bagaimana kondisi geopolitik dunia dalam beberapa tahun mendatang. Kawasan ini sangat strategis dan memiliki potensi yang sangat banyak yang dapat dikembangkan. Tetapi dinamika di dalam kawasan yang sangat multidimensi ini diperhadapkan dengan beberapa tantangan yang menghambat proses integrasi. Sehingga Amerika Serikat berupaya untuk meningkatkan kembali keterlibatannya dalam kawasan dan hadir sebagai kekuatan yang menjamin suatu pertumbuhan kawasan. Pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat menekankan kepada suatu upaya progresif dan inklusif untuk mencapai suatu kawasan yang berpegang kepada norma dan hukum internasional. Sehingga manifestasinya dapat tercapai melalui dua aspek utama yang memberikan dampak signifikan dalam kawasan yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan infrastruktur yang

berkepanjangan. Pendekatan yang komprehensif ini ditempuh berdasarkan kalkulasi rasional yang diambil oleh pemangku kebijakan di Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh dinamika dalam aspek politik dan keamanan global.

Pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat mencakup banyak aspek yang sangat kompleks, multidimensi, dan saling mempengaruhi interaksi yang terjadi. Kepentingan Amerika Serikat juga dipertaruhkan sebagai negara yang memiliki beberapa aliansi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Orientasi pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat menaruh titik berat terhadap memperkuat kerja sama multilateral dalam membangun suatu interaksi yang progresif dan berkepanjangan (White House, 2022). Konektivitas dan keterhubungan antar masyarakat lintas negara merupakan hasil dari interaksi manusia. Interaksi yang ditempuh tentunya sangat ditentukan dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, dan komunikasi yang merata akan mempermudah proses interaksi sosial tersebut untuk terjadi. Implikasi kegiatan ini tentunya juga akan mempengaruhi proses tiap negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan dan juga stabilitas dalam membangun hubungan antar negara.

Pembangunan infrastruktur dapat mendukung mobilitas dan segala bentuk interaksi yang terjadi untuk dapat mengalir lebih lancar merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong konektivitas. Membangun keterikatan antar-pulau maupun upaya untuk menghilangkan faktor geografis lainnya yang menyebabkan hambatan tertentu serta mendorong pembangunan infrastruktur, transportasi dan komunikasi yang lebih terintegrasi sudah menjadi prioritas beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik. Dalam membangun integrasi kawasan lebih mendalam, ada

beberapa hambatan yang tentunya mempersulit usaha-usaha dan program yang sudah direncanakan ataupun yang sudah dalam proses pengerjaan. Adanya regulasi, kebijakan, dan keterbatasan pada kapasitas pemerintahan masing-masing negara untuk mengakomodasi beberapa hal yang memiliki peran yang cukup vital tentunya dapat diatasi melalui konektivitas yang dapat membantu untuk mempermudah mobilisasi barang, jasa, modal, maupun interaksi antar masyarakat.

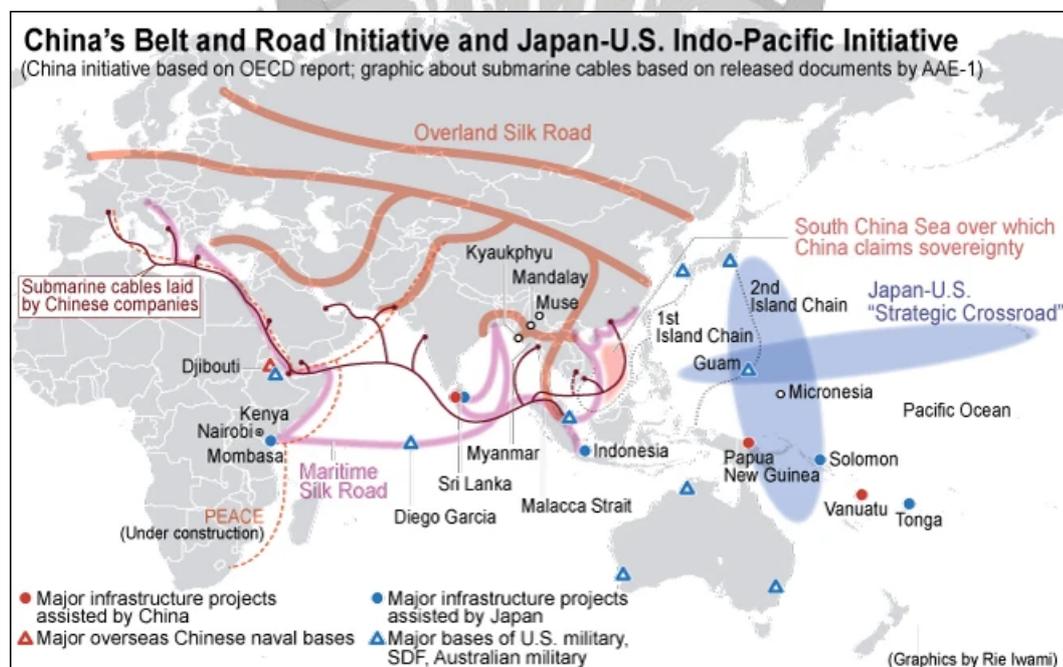
Faktor-faktor geografis yang menjadi hambatan tentunya dapat diatasi dengan adanya kapasitas infrastruktur yang memadai. Pertukaran sumber daya baik antar orang maupun teknologi dan komoditas tertentu dapat berjalan dengan sangat efisien ketika infrastruktur tersebut sudah terbangun dengan suatu dasar yang kuat dalam suatu negara. Kemudahan yang didapatkan dari konektivitas yang semakin terintegrasi tentunya akan mempermudah interaksi perdagangan yang terjadi. Pertukaran teknologi, inovasi, dan masyarakat tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan kepada pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu hambatan dalam setiap kemajuan pembangunan yang telah ditempuh oleh banyak negara. Pemerintah cenderung menerapkan kebijakan yang lebih proteksionisme menutup celah untuk integrasi multilateralisme yang lebih dalam. Tetapi hal utama yang menghambat perkembangan tersebut adalah adanya ketidaksetaraan dalam kapasitas setiap negara dalam merespons krisis yang dialami. Untuk mengantisipasi semakin berkurangnya integrasi antar negara berbagai forum dan institusi ekonomi global menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama sebagai langkah pemulihan pasca pandemi.

Tetapi beberapa penyesuaian tersebut tentunya dituangkan dalam strategi pembangunan infrastruktur yang mendorong adanya distribusi merata yang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi dan juga melakukan pendekatan *bottom-up* untuk mendukung pembangunan sosial. Beberapa rekomendasi yang diberikan juga adalah dalam menciptakan suatu pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan seiring dengan upaya untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam investasi dan perkembangan infrastruktur berkepanjangan (Abdullaev et al. 2022). Berbagai inisiatif yang dilakukan oleh negara-negara yang menjadi aktor utama maupun negara berkembang di kawasan ini juga didorong oleh dua motif utama.

Pertama dapat dilihat motif jangka pendek yang dilakukan oleh beberapa negara di bawah rezim otoriter yang menginginkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur sebagai media untuk mendapatkan legitimasi politiknya. Negara dengan klasifikasi yang pertama ini cenderung hanya bergantung kepada satu kekuatan besar saja sebagai sumber pendanaan dan bantuan lainnya. Sedangkan klasifikasi yang kedua adalah negara-negara yang terdorong oleh agenda jangka panjang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil untuk memperdalam konektivitas berdasarkan kepada norma dan prinsip internasional yang menghormati kedaulatan dan integritas internasional dalam mendorong upaya konsultasi dan dialog aktif, implementasi tata kelola pemerintahan yang baik diikuti dengan transparansi dan pertanggungjawaban (Sibal, 2020).

Dalam proses pembangunan infrastruktur pemerintah tentunya sudah menyediakan dana dan anggaran tertentu untuk mendanai proyek tersebut. Tetapi, butuh proses yang cukup lama dalam melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur karena adanya batasan dalam alokasi anggaran yang digunakan untuk agenda tersebut. Sehingga beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan beberapa kekuatan besar lainnya pun melihat hal ini sebagai peluang untuk masuk menawarkan bantuan investasi.



**Gambar 1.1. Inisiatif Pembangunan di Kawasan Indo-Pasifik**

Sumber: (The Asahi Shimbun, 2020)

Untuk menciptakan suatu pertumbuhan kawasan, dapat dilihat secara langsung ada kontestasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam memberikan inisiatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Inisiatif pembangunan yang ditawarkan oleh kedua negara tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Tiongkok memberikan tawaran untuk mendanai pembangunan infrastruktur

melalui *Belt and Road Initiative*, sedangkan Amerika Serikat mendorong kerja sama strategis dengan aliansinya melalui inisiatif Indo-Pasifik dan berbagai forum kerja sama yang ada di dalamnya. Orientasi kedua kekuatan juga dijalankan dengan pendekatan yang berbeda dan memberikan dampak yang berbeda kepada proses pembangunan yang terjadi dalam suatu negara.

Kedua negara juga membangun pendekatan dengan memberikan bantuan investasi kepada negara berkembang di kawasan adalah untuk dapat mengembangkan kapasitas domestiknya. Tetapi keterlibatan faktor eksternal yang dimanifestasikan melalui beberapa inisiatif kerja sama dengan menjanjikan tercapainya suatu integrasi pembangunan konektivitas dan infrastruktur di kawasan. Implementasi nyata dalam kawasan adalah upaya Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* dan Amerika Serikat melalui inisiatifnya dalam *Infrastructure Transaction and Assistance Network* serta inisiatif multilateral lainnya dalam *Blue Dot Network Infrastructure Initiative* bersama dengan Jepang dan Australia (Runde et al. 2020).

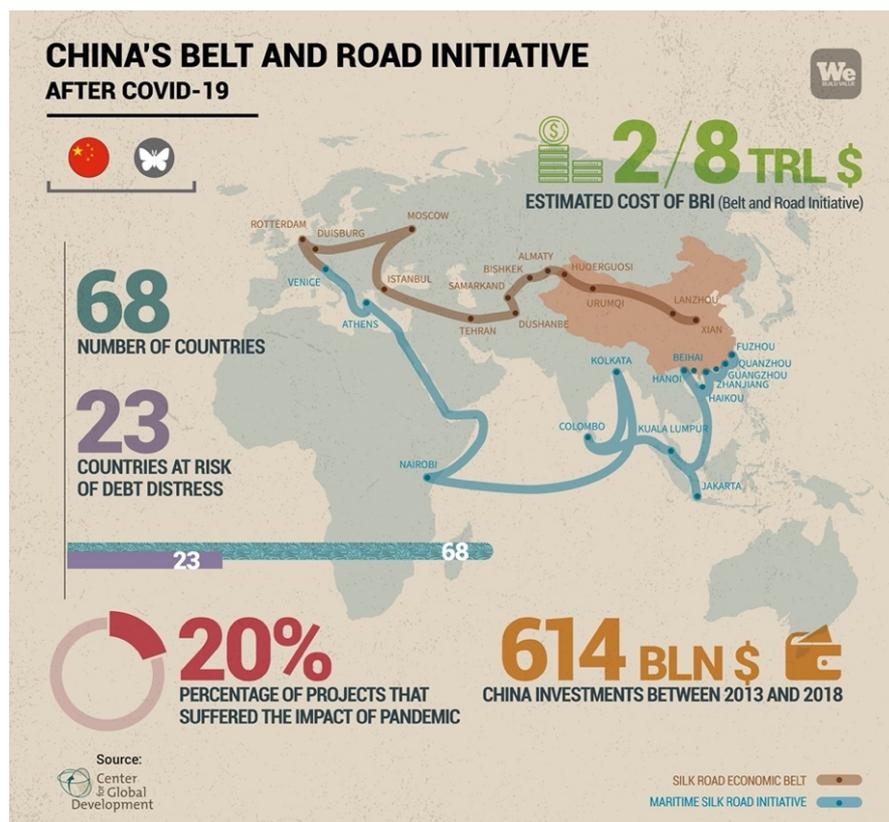
Dalam kawasan yang sangat multidimensi dan kompleks membangun suatu konektivitas adalah salah satu unsur utama agar kawasan tersebut dapat bersama-sama berkembang menjadi kawasan yang maju dan dapat beradaptasi dalam merespons segala bentuk dinamika dan perubahan yang terjadi. Kawasan Indo-Pasifik di mana terdapat banyak kekuatan berkembang dengan kepentingan untuk mempertahankan pertumbuhannya tentunya menjadi salah satu bukti betapa dinamis kawasan ini. Investasi asing dan bantuan oleh negara-negara kuat di kawasan tentunya menjadi perebutan bagi negara berkembang yang mencoba

untuk menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya dalam segala bentuk proyek pembangunan yang sedang berjalan. Beberapa negara di kawasan ini pun sudah melakukan beberapa penyesuaian melalui kebijakan perdagangan dan berusaha untuk menciptakan lingkungan domestik yang stabil dan dapat menarik minat dari investor.

Tetapi investasi bukan satu-satunya hal yang mempunyai peran signifikan dalam mempertahankan stabilitas pertumbuhan dalam suatu kawasan. Upaya untuk menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan stabilitas politik domestik. Stabilitas politik tentunya akan membantu pemerintahan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang akan mendukung dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Upaya dan komitmen untuk mendorong negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk memprioritaskan hal ini tentunya sangat signifikan perannya. Khususnya dalam mengelola proyek pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan berbagai bentuk lainnya yang melibatkan intervensi pihak asing sebagai investor.

Mempertahankan status sebagai kekuatan hegemoni global, Amerika Serikat diperhadapkan dengan dinamika interaksi global yang cukup berubah dalam beberapa dekade terakhir karena perubahan kapasitas domestik kekuatan lainnya yang cukup berkembang. Upaya Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas dan pembangunan inklusif global yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kekuatan hegemoni harus diperhadapkan dengan tantangan utama dari orientasi elite yang memimpin administrasi pemerintahan. Masa pemerintahan Donald Trump yang

cenderung lebih proteksionisme dan cenderung meninggalkan segala upaya integrasi multilateralisme yang ada menjadi salah satu tantangan yang harus dibenahi Amerika Serikat melalui membangun pendekatan yang lebih aktif lagi di pemerintahan Presiden Biden.



**Gambar 1.2 Proyeksi *Belt and Road Initiative* Tiongkok**

Sumber: Center & Global Development

Dalam menjalankan proses penyebaran *soft power* mempengaruhi negara-negara berkembang lainnya *One Belt, One Road* hadir sebagai strategi utama Tiongkok dalam memperkuat pengaruh ekonominya. Upaya ini bertujuan untuk membangun konektivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur fisik dan digital yang dibiayai oleh Tiongkok. Menurut evaluasi dari salah satu lembaga riset dan institusi lainnya beberapa karakteristik dari skema investasi Tiongkok tersebut

yang didominasi oleh peran langsung dari negara dapat secara langsung diperhadapkan dengan beberapa tantangan utama.

Pertama, memudarnya kepentingan nasional suatu negara dikarenakan kontrol dan kendali jangka panjang dari pemerintah pemberi bantuan dana. Selanjutnya adalah transparansi finansial yang tidak terjamin, beban keuangan yang tidak stabil, dan melepas kebutuhan ekonomi lokal dengan melibatkan tenaga kerja yang langsung berasal dari Tiongkok. Beberapa tantangan lainnya adalah tantangan geopolitik yang disebabkan dari persaingan dengan kekuatan besar lainnya. Tidak lepas dari hal itu, beberapa tantangan kontemporer yang dapat dihadapi juga adalah dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan besarnya potensi korupsi oleh elite politik dan birokrat (Kliman et al., 2019).

Keterlibatan faktor eksternal tentunya perlu untuk ditelaah lebih mendalam lagi sebelum melibatkan partisipasi aktif dari negara yang bersangkutan dalam proses pengerjaan proyek pembangunan domestik. Terkadang tanpa disadari kepentingan nasional kita menjadi taruhan dari keterlibatan aktor eksternal tersebut. Beberapa pertimbangan strategis juga perlu dipertimbangkan dalam melibatkan partisipasi eksternal seperti aspek komersial, ekonomis dan sosial dalam melanjutkan proyek pembangunan tersebut. Dalam proses pembangunan infrastruktur yang kerap melibatkan sumber daya dari negara yang memberikan bantuan dana terkadang adanya pengelolaan yang keliru dan tidak menimbulkan suatu efek pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Dalam membangun koordinasi yang baik dengan pihak eksternal, salah satu hal yang sangat signifikan perannya

adalah bagaimana pemerintah mengelola dan mengatur proyek pembangunan di mana pihak eksternal terlibat di dalamnya.

Dalam dinamika interaksi antar negara dalam semua aspek yang terjadi di kawasan sangat dilihat ancaman dari aksi asertif Tiongkok yang cenderung ekspansif dan dapat mengganggu keberlangsungan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik melalui upayanya yang kerap mengancam kepentingan negara lain. Khususnya dalam mendefinisikan kesepahaman mengenai perbatasan internasional yang mengancam legitimasi dan kedaulatan nasional negara. Momentum bangkitnya kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok di kawasan dimanfaatkan kekuatan besar lainnya untuk mengambil peran yang lebih dominan dan mendorong integrasi lebih mendalam dengan negara-negara berkembang. Sehingga dalam upaya untuk melakukan penyesuaiannya Amerika Serikat mengubah fokus kebijakan luar negerinya untuk mendorong integrasi yang lebih mendalam dengan negara-negara di Asia-Pasifik melalui mendorong suatu konsep *Free and Open Indo-Pacific* sebagai upaya untuk menciptakan suatu kawasan yang stabil dan damai di bawah suatu kerangka kerja sama dalam berbagai aspek.

Suatu pola interaksi dalam aspek politik yang dimainkan oleh para elit di kawasan ini khususnya di Asia Tenggara menjadi salah satu kekhawatiran terbesar Amerika Serikat. Lunturnya nilai-nilai demokratis dan implementasi suatu tata kelola pemerintahan yang baik semakin memudar. Indikasi ini ditunjukkan oleh kekuatan rezim otoritarianisme dibalik kepemimpinan militer junta di Myanmar, pembatasan oleh media yang terjadi di Filipina, parlemen yang lebih condong ke pengaruh militer di Thailand, dan beberapa aktivitas lainnya yang dapat

menyebabkan ketidakstabilan domestik dalam hubungan antar sipil-militer di beberapa negara. Seiring dengan dominannya peran pemerintah dalam menerapkan beberapa pembatasan untuk merespons pandemi COVID-19, peran masyarakat sipil dan komunitas semakin berkurang. Sehingga beberapa pengaruh eksternal dapat masuk lebih mudah dengan prospek kerja sama ekonomi dengan jumlah yang cukup besar. Namun dibalik skema yang ditawarkan tersebut, suatu manifestasi tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat ditemukan (Kurlantzick, 2022).

Karakteristik dan unsur yang ditekankan dalam inisiatif Amerika Serikat untuk membantu integrasi konektivitas di kawasan ini tentunya jauh berbeda dengan apa yang Tiongkok tekankan dalam proyek BRI. Melalui salah satu inisiatifnya dalam *Infrastructure Transaction and Assistance Network*, Amerika Serikat sangat mendorong semua instansi pemerintahannya di luar untuk membantu negara-negara berkembang dalam mendorong suatu proyek infrastruktur dengan kualitas yang maksimal. Kualitas pembangunan yang maksimal tersebut dapat dicapai dengan menciptakan perencanaan proyek yang transparan, berkepanjangan, dan juga melibatkan investasi dari sektor swasta. Amerika Serikat juga aktif mendorong kerja sama multilateral melalui *Blue Dot Network Infrastructure Initiative* yang melibatkan partisipasi Jepang dan Australia. Inisiatif ini dicirikan dengan proyek yang transparan, didorong oleh mekanisme pasar, dan dapat menciptakan suatu proyek infrastruktur yang berkepanjangan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.

Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis dalam membangun kerja sama yang lebih terintegrasi lagi di kawasan ini melalui dukungan pembangunan

suatu konstruksi kawasan yang dipengaruhi oleh kontestasi geopolitik oleh beberapa kekuatan besar di kawasan. Kontribusi yang ingin diberikan Amerika Serikat menaruh penekanan kepada bagaimana suatu nilai demokratis tersebut dapat diimplementasikan untuk menciptakan suatu kawasan yang dapat bertumbuh secara inklusif, stabil, dan tentunya didukung oleh kerja sama yang progresif. Oleh karena itu, strategi yang diformulasikan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam kebijakan *free and open Indo-Pacific* dan implementasinya melalui langkah-langkah strategis tentunya menjadi kajian utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu, melihat ada sangat banyak kepentingan strategis yang ditaruhkan oleh Amerika Serikat dalam kawasan ini dapat dimanifestasikan melalui implementasi nilai-nilai demokratis, tata kelola pemerintahan yang baik, dan upaya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Melihat adanya upaya negara-negara maju di kawasan untuk memperdalam integrasi kerja sama dengan negara-negara berkembang melalui pembangunan inklusif untuk meningkatkan konektivitas antar masyarakat topik penelitian ini dipilih. Sehingga pertanyaan penelitian yang dirumuskan bertujuan untuk melihat mekanisme inisiatif pembangunan infrastruktur berjalan seiringan dengan upaya negara-negara di kawasan mencoba untuk memperbaiki kapasitas domestiknya dalam menciptakan suatu keadaan yang kondusif untuk dapat terus berkembang.

- 1) Mengapa Amerika Serikat menekankan elemen pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik di kawasan Indo-Pasifik?

- 2) Bagaimana Amerika Serikat memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik di kawasan Indo-Pasifik sangat ditekankan dalam pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat. Mengetahui mengapa Amerika Serikat sangat menekankan aspek tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh strategi yang ditempuh untuk menciptakan suatu kestabilan dan perdamaian kawasan yang progresif sehingga dapat tercapai suatu pertumbuhan yang diproyeksikan. Sehingga sebagai upaya untuk memperdalam keterlibatannya dalam pembangunan kawasan Amerika Serikat sangat aktif mendorong implementasi tata kelola pemerintahan yang baik melalui berbagai institusi dan organisasi yang aktif mempromosikan hal tersebut.

Institusi yang bergerak dalam skala domestik maupun dalam komunitas masyarakat ini mendorong adanya penerapan nilai-nilai demokratis, progresif, dan segala unsur untuk menciptakan suatu pemerintahan yang dapat berjalan dengan baik. Selain itu untuk memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan dalam membangun konektivitas kawasan juga menjadi agenda yang penting melalui bantuan investasi ataupun keterlibatan Amerika Serikat dalam proses pembangunan infrastruktur yang lebih memadai antar negara. Unsur konektivitas dan pemerintahan yang baik adalah dua poin utama yang didorong oleh Amerika

Serikat untuk dapat menciptakan suatu kawasan Indo-Pasifik yang dapat bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi menjadi kawasan strategis yang damai dan stabil.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penulisan penelitian ini dapat diidentifikasi dua jenis manfaat yang ingin dicapai yakni manfaat akademik dan praktis. Manfaat akademik berupaya untuk menambah dan memperkaya wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai proses integrasi konektivitas di Indo-Pasifik yang ditempuh melalui upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan infrastruktur yang berkepanjangan. Diharapkan juga bahwa para pembaca dapat mengetahui lebih lanjut mengenai persaingan negara-negara besar di kawasan dalam menjalin hubungan kerja sama untuk membangun kembali pendekatannya melalui memberikan bantuan investasi asing kepada negara berkembang. Manfaat yang diharapkan juga adalah agar para pembaca memiliki kesadaran mengenai betapa pentingnya peran aktif dan partisipasi publik dalam mendukung segala upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menjamin keberlangsungan proyek pembangunan infrastruktur yang ideal.

Sedangkan klasifikasi yang kedua adalah manfaat praktis atau manfaat yang dapat langsung terlihat dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Penelitian ini bertujuan sebagai upaya dari penulis sebagai prasyarat untuk lulus dan menyelesaikan pembelajaran Magister Hubungan Internasional di Universitas Pelita Harapan. Penelitian atau tesis ini juga diharapkan siap menjadi suatu rujukan yang signifikan untuk para instansi pemerintahan, lembaga non-pemerintah, dan

organisasi serta komunitas masyarakat lainnya dalam proses pengambilan kebijakan tertentu yang tentunya relevan dengan topik penelitian yang dipilih.

### 1.5 Kerangka Penulisan

Dalam proses penulisan penelitian ini ada beberapa bab yang masing-masing memiliki penjelasan tertentu dan secara integratif menjadi dasar yang kuat untuk mengarahkan penulisan yang terarah pada penelitian ini. Adapun kerangka pada penulisan ini terbagi ke dalam 5 bab, yaitu:

**BAB I Pendahuluan:** Pada bab pertama ada beberapa poin utama yang dijelaskan yaitu latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian yang dikonstruksikan dari rumusan masalah, menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian ini dilakukan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan pengantar yang melatarbelakangi penelitian ini untuk diadakan dan juga memberikan gambaran umum yang dapat memberikan beberapa wawasan kepada pembaca.

**BAB II Kerangka Berpikir:** Penyusunan kerangka berpikir pada bagian ini bertujuan untuk memberikan suatu kerangka berpikir teoretis yang menjadi landasan teori untuk mengonstruksikan suatu argumen pada penelitian ini. Bab ini terbagi ke dalam tinjauan pustaka yang memberikan elaborasi mengenai literatur atau kajian dari penelitian sebelumnya dengan bagian tinjauan teori dan konsep yang akan digunakan untuk menjawab perumusan masalah dari penelitian ini.

**BAB III Metodologi Penelitian:** Dalam bagian ketiga dari penelitian ini, berisi penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan penelitian ini. Bagian yang ada dalam metodologi penelitian

kualitatif ini terdiri dari pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

**BAB IV Pembahasan:** Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan apa saja elemen penting yang menjadi prioritas dalam menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik di kawasan Indo-Pasifik dan bagaimana hal tersebut memiliki peran signifikan dalam menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan infrastruktur yang berkepanjangan menjadi sarana bagi Amerika Serikat untuk dapat mempertahankan pengaruhnya di kawasan. Dalam bagian ini terdiri dari 2 pembahasan utama yaitu mengenai Indo-Pasifik sebagai Kerangka Geopolitik dan Keterlibatan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.

**BAB V Kesimpulan:** Pada bagian kesimpulan, penulis akan memaparkan interpretasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis juga akan memberikan pendapat dan saran mengenai bagaimana implementasi dan upaya tiap negara dalam menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan infrastruktur yang menjadi aspek utama dalam pendekatan Amerika Serikat di kawasan.